



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA GANTING**

**DAMAI KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**M. NASRI
11627103756**

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***“Peranan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”*** yang ditulis oleh :

Nama : M. NASRI

NIM : 1127103756

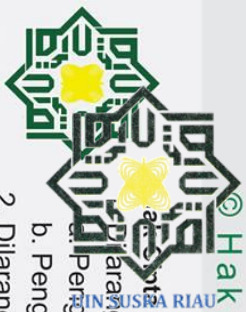
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk ujian dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2020
Pembimbing Skripsi


Syafrinaldi, SH, MA
NIP. 198109232006041004

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Nama Penulis

: M. NASRI

NIM

: 11627103756

Program Studi

: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal

: Selasa / 16 Juni 2020

Waktu

: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,

Tim Penguji

2020



1. Dr. Wahidin, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ilham Akbar, SH., MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Hj. Faraini Sahu, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Lysa Anggraini, SH., MH.
(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 198601 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak di atas milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Perijinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Nasri
 NIM : 11627103756
 Tempat/Tanggal Lahir : Ganting Damai, 05 Juli 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TERHDAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

M. NASRI
NIM. 11627103756

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kelurahan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi PKK sudah melembaga baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Melihat Program dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar salah satunya Program Kelestarian Lingkungan Hidup yaitu belum berjalannya maksimal Program Tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar serta bagaimana hambatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan programnya. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap program kelestarian lingkungan hidup yang dijalankan oleh tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Penelitian terhadap program kelestarian lingkungan hidup ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Didalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup tim pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pernah melakukan kegiatan diantaranya: (i) Penyuluhan; (ii) Gotong Royong; (iii) Menanam Tanaman Obat dan Pohon Buah; (iv) Membuat Tempat Sampah. Faktor penghambatnya adalah (i) kurangnya dukungan dari pemerintah desa, (ii) kurangnya anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga khususnya pokja IV dalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup, (iii) kurangnya sara dan prasarana, (iv) tingkat kesadaran masyarakat Desa Ganting Damai kurang. Itulah yang membuat tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak bisa menjalankan peranannya dengan baik kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan yang telah disampaikan diatas.



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karna berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholwat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda M. Shaleh dan Ibunda Sariumah serta ke- lima saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keeberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak prof. Dr. h. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
 4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
 5. Bapak Firdaus, S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
 6. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA Selaku pembimbing penulis selama ini membimbing mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
 7. Ibuk Musrifah, S.H., M.H Selaku pembimbing akademik (PA) yan telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 8. Seluruh Dosen Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang ttelah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabrannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
 10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) Angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Kepada Gandhi Alfajri, Rajul Andrami, M. safar Affandi, Yozi Herizon Putra, Fikri Afriono, Arif Riyanda dan Diona Chandra yang telah berjuang bersama dari awal kuliah hingga menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ,Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 18 Mei 2020
Penulis

M. NASRI
NIM: 11627103756

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Ganting Damai	16
B. Keadaan Sosial.....	17
C. Keadaan Ekonomi.....	19
D. Kondisi Pemerintahan Desa.....	20
E. Sarana dan Prasarana Umum Desa Ganting Damai.....	24
F. Visi dan Misi.....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.....	29
B. Asas Penyelenggaraan Pemerinta Daerah.....	34
C. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	37
D. Teori Demokrasi	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	46
B. Faktor Penghambat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menjalankan Program Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	58

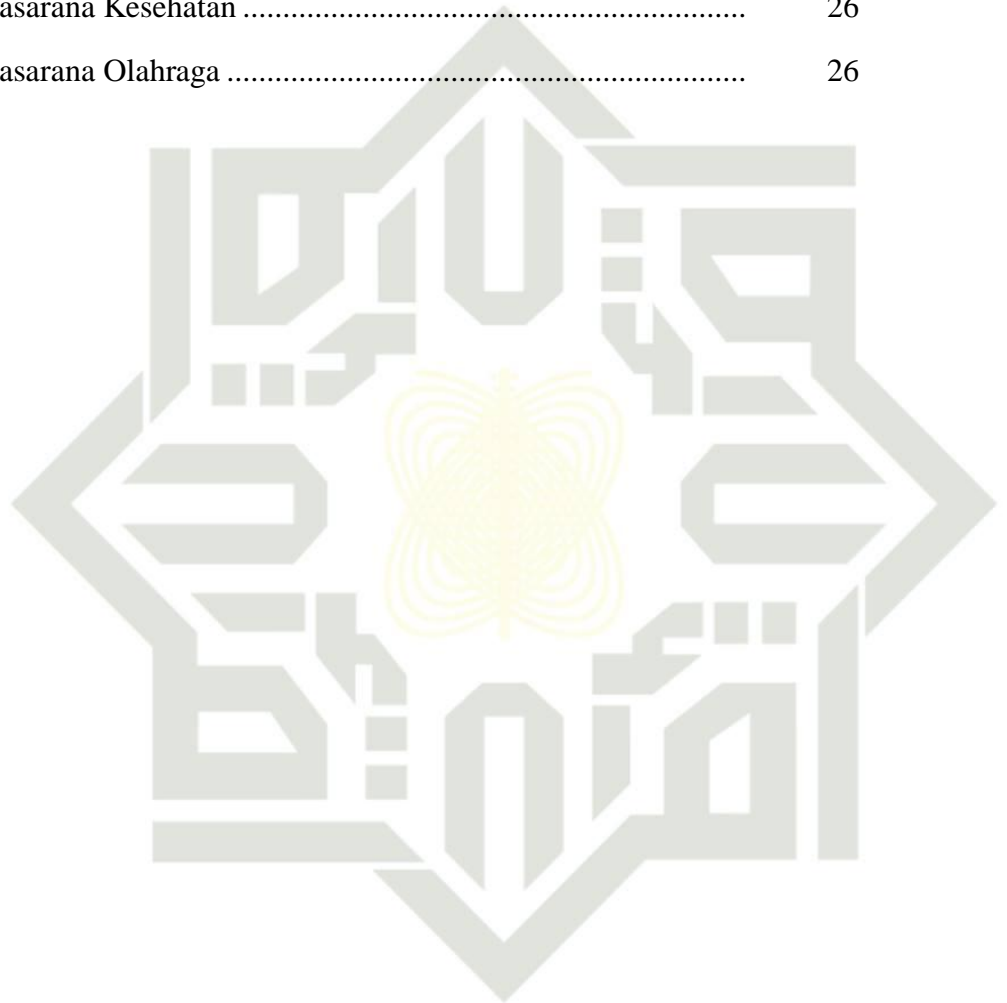
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel	10
Table II.2	Prasarana Pendidikan	25
Table II.3	Prasarana Peribadatan	25
Table II.4	Prasarana Kesehatan	26
Table II.5	Prasarana Olahraga	26



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Sosial wujud dari upaya terpenuhinya segala aspek oleh individu sehingga tercapainya hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial sebagai wujud tanggung jawab pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud manajemen berkualitas terpadu, terbuka, bermitra, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan berkelanjutan (UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Kesejahteraan sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin.

Kesejahteraan hak setiap warga Negara, dari awal kemerdekaan Indonesia sehingga sekarang kesejahteraan paling menarik perhatian karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada kenyataannya kesejahteraan hanyalah argument belaka. Kesejahteraan dilihat dari berbagai aspek kehidupan, kesejahteraan tidak luput dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita diantaranya: kekerasan perempuan dan anak, kematian ibu dan anak, kekerasan seksual, kesenjangan gender dan diskriminasi sosial.

Berangkat dari permasalahan di atas pemerintah memiliki program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan yang memiliki peran terhadap ruang lingkup keluarga yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan agar berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

Adapun yang dimaksud dengan Gerakan Peemberdayaan dan Kesejahteraan Kelaurga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 yat 1 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentaang Gerakan Peemberdayaan dan Kesejahteraan Kelaurga bahwa :

“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.¹

Tujuan PKK adalah memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraan demi terwujudnya keluarga

¹Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pasal 1 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera dan lahir batin.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, bahwasannya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki 10 program kerja pokok terdapat dalam pasal 11 yakni : a. Penghayatan dan pengamalan pancasila; b. Gotong Royong; c. Pangan; d. Sandang; e. Perumahan dan laksanakan rumah tangga; f. Pendidikan dan Keterampilan; g. Kesehatan; h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; i. Kelestarian Lingkungan Hidup; j. Perencanaan Sehat.²

Walaupun programnya sudah tersusun dengan rapi namun sepuluh dari program tersebut ada satu dari program tersebut tidak di jalankan yaitu dalam ayat (I) Tentang kelestarian lingkungan hidup apa yang terjadi didalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada khususnya di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Dalam pasal 12 dapat dijelaskan bahwa program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf I berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.³

Perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan tidak berdasarkan pada aturan tetapi juga terhadap peran masyarakat dalam pngelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna

² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, Pasal 11

³ Republik Indonesia, *Peratura Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* Pasal 12 Ayat 9

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian lingkungan fungsi – fungsi lingkungan.⁴

Hukum yang baik jika didalamnya terdapat nilai keadilan bagi semua orang, dalam rangka itu hukum berfungsi sebagai alat keadilan dalam pengelolaan lingkungan.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia itu sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya menjaga segala aspek yang ada pada masyarakat, salah satunya adalah kesehatan lingkungan banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Hendrik L menggambarkan secara ringkas keempat faktor ini (keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan) di samping berpengaruh satu sama lain.⁶

Upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dalam penerapannya dimasyarakat sanitasi meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah. Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lingkungan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dari aspek pengobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, angka

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan lingkungan hidup*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) h. 58

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991) h. 153

⁶ Ricky M.Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005) h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat dicegah. Selain itu anggaran yang diperlukan untuk preventif juga relative dari pada melakukan upaya pengobatan.⁷

Beberapa desa yang saya jumpai tim penggerak PKK melakukan program kelestarian lingkungan hidup dengan dibantu oleh masyarakat setempat para tim penggerak PKK membuat apotik hidup. Dan disitu dibantu oleh desa untuk mencari lahannya agar tim PKK dan masyarakat lebih mudah menanam tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat, bahkan para tim penggerak PKK menganjurkan kepada masyarakat agar mereka juga membuat apotik hidup di sekitar rumahnya.

Kegunaan dari apotik hidup yang dibuat oleh PKK yaitu agar masyarakat lebih mudah mencari obat apabila sedang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat bebas mengambil secara gratis tanpa harus membayar kepada tim dari penggerak PKK.

Berdasarkan fenomena-fenomena apa yang terjadi diatas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku penulis bermaksud untuk mengangkat pembahasan ini **“Pelaksanaan Program Tim Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ”.**

⁷ Mundiatur, Daryanto, *pengelolaan kesehatan lingkungan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2015) h. 55.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan program tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan faktor-faktor seperti apakah yang menghambat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam melaksanakan program kelestarian lingkungan hidup di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Terhadap kelestarian lingkungan hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?
2. Apa yang menjadi paktor penghambat Tim Peggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program kelestarian lingkungan hidup masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap kelestarian lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghamabat tim penggerak pkk dalam melakukan kelestarian lingkungan hidup masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .
 - b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
 - c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat.
- b. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁹

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁰ Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat

⁸ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (UN Press Surakarta, 1999) h. 89

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011) h. 24

¹⁰ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum,¹² dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Ketua pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, beberapa anggota PKK, dan Kepala Desa yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹³

¹¹ Zainuddin Ali *Op Cit*, h. 175

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke-12, h.14.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2011) h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁴ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total sampling*. *Total sampling* adalah pengambilan sampel yang sama dengan populasi yang ada.¹⁵

Tabel I.1
Tabel populasi dan total

No	Responden	Populasi	Total	Persentase
1	Kepala desa	1 orang	1 orang	100%
2	Ketua PKK	1 orang	1 orang	100%
3	Anggota Pokja IV	12 orang	12 orang	100 %

4. Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

¹⁴ *Ibid*, h. 124

¹⁵ Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193

¹⁶ Zainuddin Ali *Op Cit*. hlm.176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.¹⁷

3. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".¹⁸ Adapun study pustaka dibedakan dua macam, yaitu :

- a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi lain yang bersifat umum, misalnya : buku-buku, indeks, esiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti,

¹⁷ Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.2, h. 51

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya : jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁹

6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan

¹⁹ Haris Herdiasyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2014)

permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program PKK terhadap kelestarian lingkungan hidup masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, diantaranya melakukan pengawasan terhadap

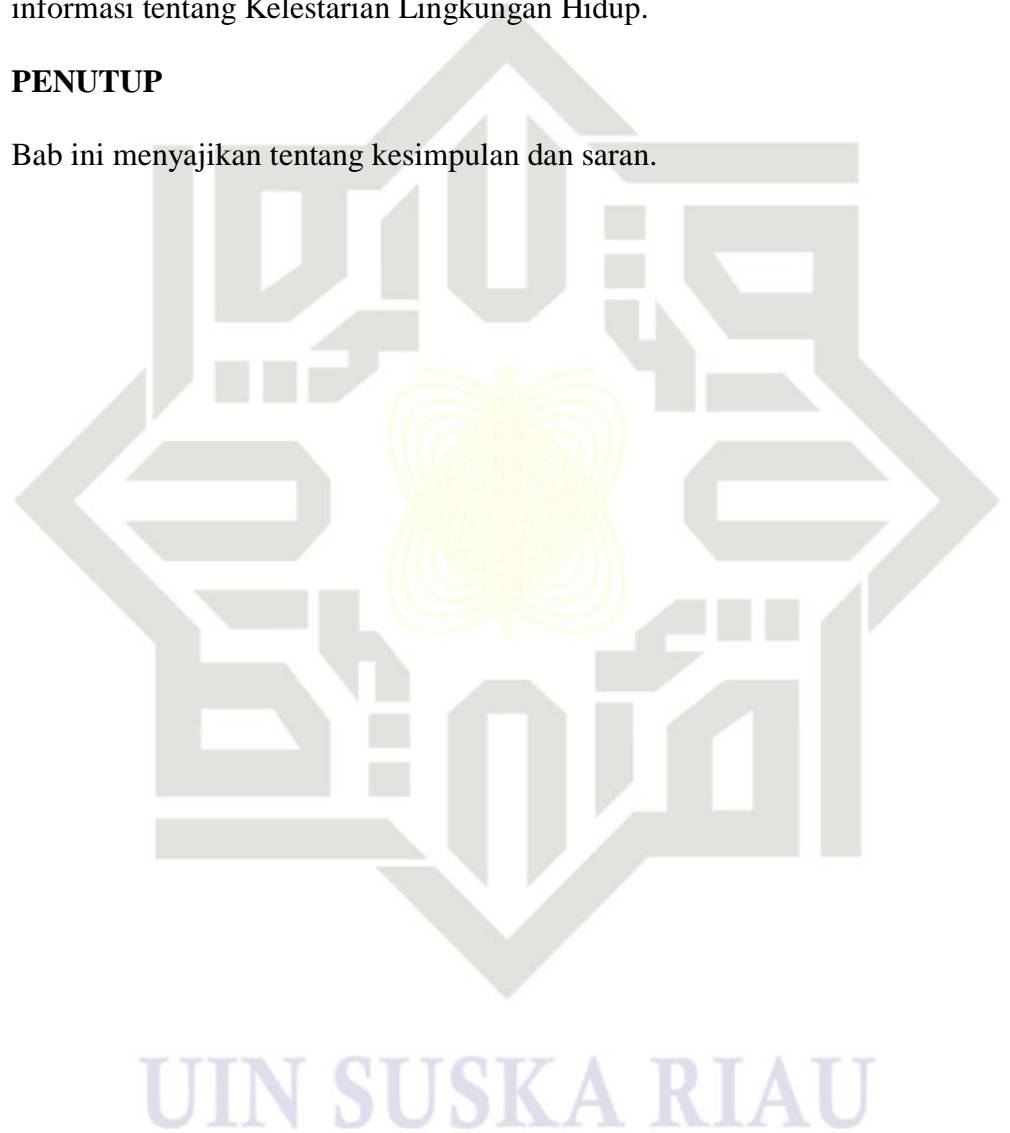
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan faktor yang menghambat dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat, memberikan usulan dan masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat, mengumpulkan data dan informasi tentang Kelestarian Lingkungan Hidup.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ganting Damai

Desa Ganting adalah hasil dari Pemekaran Kenegerian Bangkinang pada tahun 1977 dengan wilayah administrasi sama dengan wilayah kuasa wilayah ninik mamak datuk Pandak dengan sebutan Desa Muda dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Gajah (Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain (III Koto Setingkai)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu (Kenegerian Kuok)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk (Kenegerian Salo)

Penduduk Desa Ganting Damai mayoritas adalah penganut agama Islam. Desa Ganting Damai adalah hasil Pemekaran dari Desa Ganting berdasarkan keputusan Bupati Kampar Nomor : 213 tahun 2001 Tanggal 2 Oktober 2001 tentang pengesahan 12 Desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Kampar dan didepenitipkan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 392 tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang penetapan /pembentukan Desa Persiapan Desa Ganting Damai Kecamatan Bangkinang Barat menjadi desa depenitip dalam daerah Kabupaten Kampar dengan Kepala Desa sebagai berikut :²⁰

²⁰ Data diperoleh dari Profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahun (2001 – 2003) ZAMRI Sebagai Kepala Desa dan MUHAMMAD YUSUF Sebagai Sekdes

Tahun (2005 – 2011) SYAFI'I, S.Hi Sebagai Kepala Desa dan MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Sekdes

Tahun (2011 – 2014) AGUSTIAN YUSRO, S.Pd Sebagai Kepala Desa dan MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Sekdes

Tahun (2014 - 2015) MUHAMMAD YUSUF, SH Sebagai Pj Kepala Desa

Tahun (2015-2021) ALI ABRI, S.Pd Sebagai Kepala Desa dan FEBRI KAMAL Sebagai Sekdes.

Adapun Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yaitu :

1. Kepala Keluarga : 452 KK
2. Laki-laki : 1.044 Orang
3. Perempuan : 1.017 Orang

B. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 400 Orang
2. SLTP/ MTs : 512 Orang
3. SLTA/ MA : 712 Orang
4. S1/ Diploma : 42 Orang
5. Putus Sekolah : 489 Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Buta Huruf : 21 Orang²¹

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun
2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju dan Dusun Sukun
3. SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dusun Suka Maju

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 55 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini :orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 55 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 .orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 467 .orang
2. Balita gizi buruk :orang
3. Balita gizi baik : 467 .orang
4. Balita gizi kurang :orang

²¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Keadaan Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 162,5 .ha
2. Padi Ladang	: 5 ha
3. Jagung	: 9 .ha
4. Sawit	: 350 ha
5. Karet	: 800 ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 117 ekor
2. Sapi	: 30 ekor
3. Kerbau	: 150 ekor
4. Ayam	: 500 ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan	: 3 ha
----------------	--------

d). Struktur Mata Pencapaian

Jeis Pekerjaan :

1. Petani	: 854 orang
2. Pedagang	: 20 orang
3. PNS	: 6 orang
4. Tukang	: 39 orang
5. Guru	: 20 orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidan/ Perawat	: 12 orang
7. TNI/ Polri	: 1 orang
8. Pesiunan	: 2 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 10 orang
10. Buruh	: 129 orang

D. Kondisi Pemerintahan Desa

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1 orang
2. Sekretaris Desa	: 1 orang
3. Perangkat Desa	: 9 orang
4. BPD	: 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	: 1 Kelompok
2. PKK	: 1 Kelompok
3. Posyandu	: 2 Kelompok
4. Pengajian	: 10 Kelompok
5. Kelompok Tani	: 10 Kelompok
6. Gapoktan	: 1 Kelompok
8. Simpan Pinjam	: 1 Kelompok
9. Kelompok Tani	: 5 Kelompok
10. Karang Taruna	: 1 Kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Dusun Suka Maju | : Jumlah 6 RT / 3 RW |
| 2. Dusun Sukun | : Jumlah 4 RT / 2 RW |
| 3. Dusun Sepakat | : Jumlah 4 RT / 2 RW |

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA GANTING DAMAI

KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Kepala desa | : ALI ABRI, S.Pd |
| Sekretaris Desa | : FEBRI KAMAL |
| Kepala Seksi Pemerintahan | : EFRI |
| Kepala Seksi Kesejahteraan | : M. NASIR |
| Kepala Seksi Pelayanan | : SUHENDRI, S.Sos |
| Kepala Urusan Umum | : IDA FITRI YANIS |
| Kepala Urusan Perencanaan | : ZULHENDRA, A.Md |
| Kepala Urusan Keuangan | : WAN NORASIAH |
| Kepala Dusun | |
| 1.Dusun Suka Maju | : SUKARNI |
| 2.Dusun Sukun | : YUNASRI, S.Sy |
| 3.Dusun Sepakat | : ZULMAS'ADI, S.Pt |

e). Struktur Organisasi PKK

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGGERAK PKK
DESA GANTING DAMAI
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA ANGGOTA PEMBERDAYAAN dan
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Ketua : MASTURA, S. PD

Wakil Ketua : AIDIL FITRI

Sekretaris : 1. SEKRETARIS
2. DESMA WATI

Bendahara : 1. NURHUDA
2. SITI ROHANI

Pokja I

Ketua : AIDIL FITRI

Wakil : NURHUDA

Sekretaris : HERMA YENIS

Anggota : 1. HASNIMAR
2. MARHENIS

3. NAPSIA

4. WIDIA WATI

5. DASMAWATI

6. SYAMSIAR

7. RODIYAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokja II

Ketua
Wakil
Sekretaris
Anggota

8. DESMANELI

: ERNWATI
: NUR INSANI
: RITATI
: 1. LIDIA SATRIANIS
2. WAN NORASIA
3. ROSMIATI
4. NURBAYA
5. NIRWANA
6. DESMAWATI
7. FITRI YANTI
8. NURMIATI

Pokja III

Ketua
Wakil
Sekretaris
Anggota

: IDA FITRI YANIS
: YUSMULIANA
: EKA
: 1. ARMAYANTI
2. SURYANI
3. NUR LAILA
4. YUSNAWATI
5. YANTI MARLINA
6. NURHAYATI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokja IV

Ketua	: YENNI MARDALENA
Wakil	: NANIK
Sekretaris	: NUR MAYSURI
Anggota	: 1. ERNI YANTI 2. YUSNELI TENTI 3. EVI ZAHRIAH 4. NUR KASNAH 5. IRA WATI 6. MIRA WATI 7. MELIZA 8. SITI MARIANI 9. NURAI SYAH

E. Sarana dan Prasarana Umum Desa Ganting Damai

1. Prasarana Pendidikan

Desa Ganting Damai merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk usia sekolah relatif banyak dibandingkan Desa lainnya yang ada di Kecamatan Salo. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Desa setempat. Adapaun prasarana pendidikan di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batu Sasak Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Prasarana Pendidikan

NO	Prasaran Pendidikan	Jumlah (Unit)
	Taman Kanak-kanak (TK)	2
	Sekolah Dasar (SD)	3
	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Sasak Kecamatan Salo

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat 2 unit Taman Kanak-Kanak, 3 unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit Madrasah Tsanawiyah (MTS).

2. Prasarana Peribadatan

Prasaran peribadatan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.3
Prasarana Peribadatan

NO	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
	Musholla	3
	Masjid	3

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka prasarana peribadatan yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 3 unit masjid, dan 6 unit mushalla. Tersedianya prasarana peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan pengamalan kehidupan beragama bagi masyarakat Desa setempat.²²

3. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa. Prasaran dan sarana kesehatan yang terdapat di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.4
Prasarana dan Sarana Kesehatan

No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	2
3.	Bidan	3
4.	Pengobatan Alternatif	2

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

4. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang ada di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.5
Prasarana Olahraga

No	Prasaran Olahraga	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bola voli	2
3.	Bulu tangkis	1

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo

²² Ibid

F. Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.²³

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sipungguk dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

²³ Data diperoleh dari Profil Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

a. Visi Desa

**“DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN KETERBUKAAN
MEMBANGUN NEGERI MENUJU MASYARAKAT MAJU,
ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA ”**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ganting Damai baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sipungk mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

1. Mencari, menerima saran dan kritikan masyarakat dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.
2. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.
5. Meningkatkan peran aparat pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Pengertian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PKK salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kelurahan. Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi PKK sudah melembaga baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.²⁴

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Pasal 1 bahwa:

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi

²⁴ Wikipedia, *Pemberdayaan Keluarga Sejahtera*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lujur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.²⁵

b. Tujuan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tujuan PKK yaitu : Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi lujur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.²⁶

c. Visi dan Misi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi lujur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Misi

- > Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak

²⁵ Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pasal 1 Ayat 1

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri no1 Tahun 2013 Tentang Pemberddayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, pasal 2 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan gotong royong serta pembentukan watak bangsa yang selaras.

- > Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
- > Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan perkarangan melalui halaman asri, teratur dan indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- > Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- > Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program – program nya yang disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- > Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota PKK melalui berbagai dan pembelajaran terstruktur.

d. Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan pasal 11 yang penjelasan nya terdapat pada 12 Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pokok PKK ada 10 yaitu :

1. Program penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Program pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kearifan lokal.²⁷
4. Program sandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral bangsa Indonesia.
5. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e berupa peningkatan kesadaran

²⁷ Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah.

6. Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 f berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
7. Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Program pengembangan kehidupan berkooperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkooperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.
9. Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf I berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.
10. Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga yang berkualitas.²⁸

²⁸ *Ibid*, pasal 11

B. Asas-Asas Penyelenggaran Pemerintah Daerah

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat untuk mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Dalam bahasa Belanda otonomi berarti “pemerintahan sendiri” (zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri) dan Zelfpolitie (menindaki sendiri).³⁰

Pengertian istilah otonomi dengan pemakaian yang lebih terbatas dari etimologinya dikemukakan oleh Logeman yaitu kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Syarifudin menyatakan ada dua aspek utama dalam otonomi yaitu: pemberian tugas dan kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut (Syarifudin, 1983: 23).

²⁹ Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) h.10

³⁰ S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke daerah*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2002) h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi kekuasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintah, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya).³¹

2. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah daerah tingkat pusat, dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tapi wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas itu.³²

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (11) tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah

³¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 9

³² Ni' matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009), cetakan ke-1 h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi.

Berdasarkan hal tersebut hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- a. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.
- b. Urusan pemerintah dapat ditugas bantukan adalah yang menjadi kewenangan dari instansi yang menugaskan.
- c. Kewewnnangan yang dapat ditugas bantukan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugas bantukan kepada instansi lain.
- d. Urusan pemerintahan yang dapat ditugas bantukan tetap menjadi kewenangan dari intansi yang menegaskannya.
- e. Kebijakan, strategi, pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya.
- f. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan, sesuai dengan situasi, kondisi serta kemampuannya.
- g. Institusi yang ditugaskan wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan urusan pemerintahan yang dikerjakannya kepada institusi yang menugaskannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan maksud dan tujuan adanya tugas pembantuan adalah :

- a. Meningkatkan efesensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan umum.
- b. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pembangunan bagi daerah dan desa.³³

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Salah satu elemen dari asas-asas hukum tata Negara juga adalah asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dengan fungsi kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintahan yang memenuhi prinsip Negara hukum dan asas pemerintahan yang demokratis.³⁴

Istilah asas dalam asas umum pemerintahan yang baik menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai “asas hukum”, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintaahan. Kaidah atau norma adalah ketentua-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dengan hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas-asas hukum

³³ Ibid, hlm 90

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019) h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih didalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum.³⁵

Konsep mengenai AAUPB ini berkaitan langsung dengan sikap tindakan pemerintah serta pertanggung jawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Berikut ini akan diketengahkan beberapa AAUPB dalam pembahsan ini.

1. Asas Kepentingan Umum

Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayan rakyat, harus mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompok. Asas ini merupakan bagian dari dorongan kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU pemda 2014, UU PB 2009 penjelasan mengenai asas kepentingan umum dapat diketengahkan sebagai berikut :

- a. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan akomodatif.

³⁵ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, (Bandung : Refika Aditama, 2012) h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- c. Asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.³⁶

2. Asas kemanfaatan

Dalam pelajaran ilmu hukum, kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahsan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi didalam kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia* manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.³⁷

Dalam konteks pemerintahan, kemanfaatan juga sangat sentral secara eksistensial, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan, apakah

³⁶ *Opcit*, h. 67

³⁷ *Ibid*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang dijalankan memiliki kemanfaatan untuk masyarakat atau tidak. Karena itu, asas ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan posisi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab guna mensejahterakan rakyat.

3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas tertib penyelenggaraan Negara mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Unsur-unsur ini juga menunjukkan kemiripan dengan asas kepastian hukum materiel (asas kepercayaan) sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dimana keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dituntut untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.³⁸

Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan keserasian gerak diantara para pelaku (pemerintah,swasata dan masyarakat). Ketiga pilar pemerintahan yang baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dan menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait. Pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan dibidang tertentu, manakalah kegiatan tersebut sudah mampu ditangani sendiri oleh masyarakat/swasta.³⁹ Akan tetapi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyangkut hidup orang banyak seperti pemenuhan air bersih, lingkungan bersih, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perumahan, dan kepentingan

³⁸ Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, (Jakarta : Judicial Support Sektor Program, 2016), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Maka pemerintah tidak boleh lepas tangan melainkan harus menjamin terpenuhi hak-hak warga Negara secara penuh dengan peningkatan yang progresif.

Campur tangan pemerintahan hanya melalui kebijakan/perundangan untuk mendorong dan menciptakan suasana berperannya masyarakat, sehingga memupuk kemandirian masyarakat. Prinsip tertip penyelenggaraan pemerintahan ini ingin menghindarkan bentrokan/pertentangan diantara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

D. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cretain* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.⁴⁰

Sementara itu, dalam kamus *Dictionary Websters*, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.⁴¹

⁴⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003) h. 98

⁴¹ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016) h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Dahlan Thaib “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Selanjutnya Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan kepada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.⁴²

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;

⁴² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :

1. Pemerintah yang bertanggungjawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
6. Terdapat berbagai sumber informasi;
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan
6. Pemilu yang bebas dan adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya⁴³ :

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

⁴³ Ibid. h-33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu melakukan kegiatan diantaranya; (1) mengadakan Penyuluhan; (2) melakukan gotong royong; (3) menanam tanaman obat dan pohon buah; (4) dan membuat Tempat sampah
2. Faktor penghambat tim penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah diantaranya; (i) Kurangnya dukungan dari pemerintahan desa(ii) kurangnya anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Khususnya Pokja IV dalam menjalankan programnya; (iii) kurangnya sarana dan prasarana, serta; (iv) kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar

B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagaimana yang diharapkan oleh anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa membantu pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat yang ada didesa . Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar serta Kecamatan salo dalam hal ini Ibuk Camat salo diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kepada masyarakat yang ada di se-Kecamatan salo supaya program yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bisa berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu adanya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat agar bisa menjaga lingkungan sekitar supaya tidak tercemar serta tetap terjaga kebersihannya dan terlibat aktif untuk sama-sama bekerja sama agar terciptanya suatu tatanan Pemerintahan Desa yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ali, Faried. 201. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : sinar Grafika.
- Daryanto, Mundiatur. 2015. *pengelolaan kesehatan lingkungan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan lingkungan hidup*. Bandung : Refika Aditama.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. 1991. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herdiasyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Huda, Ni' matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, Setya. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*. Jakarta : Judicial Support Sektor Program.
- Ricky, M. Mulia. 2005. *Kesehatan Lingkungn*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sapopo, HB. 1999. *Metode Penelusuran Kualitatif*. Surakarta : UN Press.
- Safia. 2016 *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Supriyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sarundajang, S.H. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke daerah*. Jakarta : Sinar Harapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet ke-12.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. Ed.2.

Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widjaja, Haw. 2000. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal Analisis. Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193

Wikipedia, *Pemberdayaan Keluarga Sejahtera*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2017.

www.artikelbagus.com *Artikel, Lingkungan Hidup*, 2013. Diakses tanggal 12 Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*.

Undang-Uandang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALOKABUPATEN KAMPAR, ditulis oleh saudara :

Nama : M. NASRI
NIM : 11627103756
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa/ 31 Desember 2019
Narasumber : HELEN LAST FITRIANI, SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2020

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan
Dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

JALANUS, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

HELEN LAST FITRIANI, SH., MH
NIK. 130217121

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Februari 2020

: Un.04/F.I/PP.00.9/795/2020

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M. NASRI
NIM	: 11627103756
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Ganting Damai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peranan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kelestarian Lingkungan
Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Citra Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30607
T E N T A N G



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : P.00.9/975/2020 Tanggal 6 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : M. NASRI |
| 2. NIM AKTP | : 11627103756 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA GANTING DAMAI, KECAMATAN SALO, KABUPATEN KAMPAR |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/232

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/IZIN-PMSP/30607, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

: **M. NASRI**
: 11627103756
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
: ILMU HUKUM
: S1
: PEKANBARU
: **PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA
GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**
: DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Lokasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Maret 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Sdr. Camat Salo di Salo.

Kepala Desa Ganting Damai di Salo.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Nama
NIM
Universitas
Program Studi
Jenjang
Alamat
Judul Penelitian

Lokasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Maret 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Sdr. Camat Salo di Salo.

Kepala Desa Ganting Damai di Salo.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP.
SALO

REKOMENDASI

No : 070/KESSOS-SL/2020/06

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
No. 070/3KBP/2020/232 tanggal 09 Maret 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan
kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi.

Selubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : **M. NASRI**
No. Mahasiswa : 11627103756
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : **HUMI HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Lokasi Penelitian : **DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Untuk melakukan Penelitian serta Pengumpulan Data yang akan dijadikan bahan pembuatan
skripsi guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir dengan judul :

“ PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DIDESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR ”

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Demiikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Salo
Pada tanggal 09 Maret 2020

An.CAMAT SALO
SEKCAM,

M. SYAFEL SE

NIP. 19640527 199402 1 001

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

KEPALA DESA GANTING DAMAI

Dr. M. NUR MAHYUDDIN – GANTING DAMAI

KODE POS : 28451

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/SK/GD/Riset/88

Berdasarkan Surat dari Kecamatan Salo Nomor 070/KESSOS-SL/2020/06 Tanggal 09 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : **M. NASRI**
NIM : 11627103756
Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **Pekanbaru**

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk keperluan riset yang berjudul “ **PERANAN TIM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DIDESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR** ” di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GANTING DAMAI, 10 Maret 2020
KEPALA DESA GANTING DAMAI

ALI ABRI, S.Pd



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Nasri**
NIM : **11627103756**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul : **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan presiden No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**
Pembimbing : **Syafrinaldi, SH, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Im Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



M. NASRI, lahir di Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Riau, 05 Juli 1997. Merupakan anak ke-6 dari Pasangan Bapak M. Saleh dan Ibu Sariuma. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 11 Ganting Damai, Desa Ganting Damai dan lulus pada tahun 2010, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ganting Damai dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Bangkinang dan lulus pada tahun 2016.

Selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya ke perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.

Selama perkuliahan Penulis memiliki pengalaman magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru pada tahun 2018 yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dan penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2019 di Desa Buluh Apo, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2019 Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan Judul “ Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ”. Pada tanggal 16 Juni 2020 Penulis melaksanakan ujian Munaqasyah / sidang skripsi dan dinyatakan lulus dengan nilai IPK 3,16 Predikat Memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).